



PIMPINAN DPRD KOTA KEDIRI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DPRD KOTA KEDIRI  
NOMOR : 100.3.2/74/419.050/2025

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI  
TAHUN 2026

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan program pembentukan peraturan perundang-undangan Kota Kediri yang terencana terpadu dan sistimatis dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perlu ditetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Kediri Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  6. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kota Kediri Nomor 15 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 70);
  7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2020 Nomor 6);

- Memperhatikan :
1. Rapat Kerja Bapemperda bersama Tim Eksekutif Kota Kediri tanggal 8 Desember 2025;
  2. Surat Walikota Kediri tanggal 3 Desember 2025 Nomor : 100.3.2/1756/419.033/2025 perihal Usulan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2026 dan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 9 Desember 2025 mengenai Propemperda Kota Kediri Tahun 2026;
  3. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri tanggal 19 Desember 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2026.

KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Kediri Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri dan Pemerintah Kota Kediri dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2026.
- KETIGA : Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 19 Desember 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA KEDIRI  
KETUA,



**Dra. FIRDAUS**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DPRD KOTA KEDIRI  
 NOMOR : 100.3.2/ /419.050/2025  
 TANGGAL : 19 Desember 2025

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI  
 TAHUN 2026**

No. (1)	JENIS (2)	TENTANG (3)	MATERI POKOK (4)	STATUS (5)		PELAKSANAAN (6)	DISERTAI (7)		UNIT/ INSTANSI TERKAIT (8)	TARGET PENYAMPAI AN (9)
				BARU	UBAH		NA	PENJEL ASAN		
1.	Perda Eksekutif	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan Pendidikan</li> <li>- Penyelenggaraan Pendidikan</li> <li>- Peserta didik Pendidik dan tenaga kependidikan</li> <li>- Peran serta orang tua dan Masyarakat</li> <li>- Ketentuan perizinan</li> <li>- Kerja sama</li> <li>- Pembinaan dan pengawasan</li> <li>- Sistem informasi dan pelaporan</li> </ul>	v		<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU Nomor 20 Tahun 2003</li> <li>- UU Nomor 23 Tahun 2014</li> <li>- PP Nomor 48 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 18 Tahun 2022</li> <li>- PP Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 66 Tahun 2010</li> <li>- PP Nomor 57 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 4 Tahun 2022</li> </ul>	v		Dinas Pendidikan	Maret
2.	Perda Eksekutif	Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penganggaran dalam APBD</li> <li>- Penghitungan bantuan keuangan</li> <li>- Pengajuan bantuan keuangan</li> <li>- Verifikasi kelengkapan</li> </ul>	v		<ul style="list-style-type: none"> <li>- PP Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Nomor 1 Tahun 2018</li> <li>- Permendagri Nomor 36</li> </ul>	v		Bakesbang pol	Maret

No. (1)	JENIS (2)	TENTANG (3)	MATERI POKOK (4)	STATUS (5)		PELAKSANAAN (6)	DISERTAI (7)		UNIT/ INSTANSI TERKAIT (8)	TARGET PENYAMPAI AN (9)
				BARU	UBAH		NA	PENJEL ASAN		
			administrasi - Penyaluran bantuan keuangan - Penggunaan bantuan keuangan - Pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan			Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020				
3.	Perda Eksekutif	Penyelenggaraan Jalan Kota	- Jenis dan klasifikasi jalan - Penetapan status jalan - Penataan dan pengelolaan jalan - Pengaturan hak dan kewajiban masyarakat dan badan usaha terkait penyelenggaraan jalan - Perencanaan dan pembangunan jalan - Pemeliharaan jalan - Penggunaan dan pemanfaatan bagian-bagian jalan - Penataan dan Pengawasan jalan - Pembinaan jalan			- UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan - UU Nomor 2 Tahun 2022 - PP Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan			DPUPR	Maret
4.	Perda Eksekutif	Cadangan Pangan	- Tujuan - Penyediaan			- UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan	v		DKPP	April

No. (1)	JENIS (2)	TENTANG (3)	MATERI POKOK (4)	STATUS (5)		PELAKSANAAN (6)	DISERTAI (7)		UNIT/ INSTANSI TERKAIT (8)	TARGET PENYAMPAI AN (9)
				BARU	UBAH		NA	PENJEL ASAN		
		Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan</li> <li>- Penyimpanan</li> <li>- Distribusi</li> <li>- Pengawasan cadangan pangan</li> </ul>			- PP Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi				
5.	Perda Eksekutif	Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Rokok	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengaturan KTR</li> <li>- Peran serta masyarakat</li> <li>- Pembentukan satuan tugas penegak KTR</li> <li>- Larangan dan kewajiban</li> <li>- Sanksi</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU Nomor 17 Tahun 2023</li> <li>- PP No 109 Tahun 2012</li> <li>- Peraturan Bersama Menkes dan Mendagri Nomor 188/Menkes/PP/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011</li> </ul>			Dinkes	Mei
6.	Perda Eksekutif	Pengelolaan Air Limbah Domestik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah</li> <li>- Penyelenggaraan pengelolaan Air Limbah Domestik</li> <li>- Kelembagaan</li> <li>- Kerjasama</li> <li>- Perizinan berusaha</li> <li>- Tarif, subsidi, dan insentif</li> <li>- Peran serta masyarakat</li> <li>- Hak, kewajiban, dan larangan</li> <li>- Data dan informasi</li> <li>- Sosialisasi dan promosi</li> <li>- Pembiayaan</li> </ul>	v		<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU Nomor 32 Tahun 2009</li> <li>- PP Nomor 22 Tahun 2021</li> </ul>	v		DPUPR	April

No. (1)	JENIS (2)	TENTANG (3)	MATERI POKOK (4)	STATUS (5)		PELAKSANAAN (6)	DISERTAI (7)		UNIT/ INSTANSI TERKAIT (8)	TARGET PENYAMPAI AN (9)
				BARU	UBAH		NA	PENJEL ASAN		
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kompetensi</li> <li>- Pembinaan dan pengawasan</li> </ul>							
7.	Perda Eksekutif	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lampiran I struktur dan besarnya tarif retribusi jasa umum atas pelayanan kesehatan</li> <li>- Lampiran II struktur dan besarnya tarif retribusi jasa umum atas pelayanan kebersihan</li> <li>- Lampiran III struktur dan besarnya tarif retribusi jasa umum atas pelayanan parkir di tepi jalan umum</li> <li>- Lampiran VI struktur dan besarnya tarif retribusi jasa usaha atas jasa penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan</li> </ul>		v	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU Nomor 1 Tahun 2022</li> <li>- PP Nomor 35 Tahun 2023</li> </ul>		v	DISHUB DINKES DLHKP	Mei
8.	Perda Eksekutif	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan pendapatan daerah TA 2025</li> <li>- Pelaksanaan belanja daerah TA 2025</li> <li>- Pelaksanaan pembiayaan daerah TA 2025</li> </ul>	v		<ul style="list-style-type: none"> <li>- PP Nomor 12 Tahun 2019</li> <li>- Permendagri Nomor 77 Tahun 2020</li> </ul>		v	BPPKAD	Juni

No. (1)	JENIS (2)	TENTANG (3)	MATERI POKOK (4)	STATUS (5)		PELAKSANAAN (6)	DISERTAI (7)		UNIT/ INSTANSI TERKAIT (8)	TARGET PENYAMPAI AN (9)
				BARU	UBAH		NA	PENJEL ASAN		
9.	Perda Inisiatif	Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	- Upaya percepatan dan penguatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan pemukiman kumuh dilaksanakan dalam bentuk kebijakan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman serta pola pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan pemukiman kumuh	v		- UU nomor 1 tahun 2011 ttg perumahan dan kawasan pemukiman - UU nomor 20 tahun 2011 ttg Rumah susun - PP Nomor 14/2016 penyelenggaraan Perumahan dan kawasan pemukiman - Permen PUPR Nomor 29/PRT/M/2018	v		Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Juni
10.	Perda Inisiatif	Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	- Tujuan Penataan dan Pemberdayaan PKL - Aspek penataan PKL meliputi : Lokasi, waktu operasional, pendataan, dan perizinan. - Aspek Pemberdayaan PKL meliputi : pelatihan ketrampilan, sarana pemasaran, dan bantuan permodalan. - Hak, Kewajiban, dan Larangan - Pembinaan, Pengawasan, dan Penertiban PKL - Peran Serta Masyarakat	v		- PP Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penataan dan Pembinaan PKL - Permendagri No 41 Tahun 2012	v		Disperdagin	Juni

No. (1)	JENIS (2)	TENTANG (3)	MATERI POKOK (4)	STATUS (5)		PELAKSANAAN (6)	DISERTAI (7)		UNIT/ INSTANSI TERKAIT (8)	TARGET PENYAMPAI AN (9)
				BARU	UBAH		NA	PENJEL ASAN		
11.	Perda Inisiatif	Raperda Fasilitasi Jaminan Produk Halal	- Upaya Pokok menjamin kepastian Hukum atas produk makanan halal melalui persertifikatan dan Pengawasan makanan halal di Masyarakat perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk terselenggarannya kegiatan ekonomi yang mandiri dan berdaya saing	v		- UU Nomor 33 Tahun 2014 - PP Nomor 39 Tahun 2021	v		DPMPTSP	Juni
12.	Perda Inisiatif	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	- Terkait Jalan Lalu lintas - Keselamatan terkait Operasi Gabungan - Jalan Propinsi - Jalan Daerah - Trayek Angkutan dalam kota - Uji Kir - Parkir - Perlintasan kereta Api (Jalur Perlntasan Langsung)	v		- UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ - UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah - UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja	v		Dinas Perhubungan	Juli
13.	Perda Eksekutif	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan	- Kedudukan pengurus barang pengelola - Persyaratan status kepegawaian Pengurus barang - Pengertian hibah		v	- PP Nomor 27 tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020 - Permendagri Nomor 19 Tahun 2016		v	BPPKAD	September

No. (1)	JENIS (2)	TENTANG (3)	MATERI POKOK (4)	STATUS (5)		PELAKSANAAN (6)	DISERTAI (7)		UNIT/ INSTANSI TERKAIT (8)	TARGET PENYAMPAI AN (9)
				BARU	UBAH		NA	PENJEL ASAN		
		Barang Milik Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kewenangan pemegang kekuasaan BMD</li> <li>- RKBMD</li> <li>- Kelengkapan dokumen persyaratan penetapan status penggunaan BMD</li> <li>- Pemanfaatan</li> <li>- Pengamanan</li> <li>- Penilai</li> <li>- Pemindahtanganan</li> <li>- Penghapusan</li> <li>- Pemantauan, penertiban dan investigasi</li> </ul>			sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024				
14.	Perda Eksekutif	Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perubahan Pendapatan daerah TA 2026</li> <li>- Perubahan Belanja daerah TA 2026</li> <li>- Perubahan Pembiayaan daerah TA 2026</li> </ul>	v		<ul style="list-style-type: none"> <li>- PP Nomor 12 Tahun 2019</li> <li>- Permendagri Nomor 77 Tahun 2020</li> <li>- Permendagri Nomor 14 Tahun 2025</li> </ul>		v	BPPKAD	September
15.	Perda Eksekutif	Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Di Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendelegasian Kewenangan</li> <li>- Perizinan Berusaha</li> <li>- Non Perizinan</li> <li>- Pelayanan Perizinan</li> <li>- Pelaporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di</li> </ul>	v		PP Nomor 28 Tahun 2025	v		DPMPTSP	Oktober

No. (1)	JENIS (2)	TENTANG (3)	MATERI POKOK (4)	STATUS (5)		PELAKSANAAN (6)	DISERTAI (7)		UNIT/ INSTANSI TERKAIT (8)	TARGET PENYAMPAI AN (9)
				BARU	UBAH		NA	PENJEL ASAN		
			Daerah dan Non Perizinan Pengawasan dan Pembinaan Perizinan Berusaha Di Daerah dan Non Perizinan							
16.	Perda Eksekutif	APBD Tahun Anggaran 2027	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendapatan daerah TA 2027</li> <li>- Belanja daerah TA 2027</li> <li>- Pembiayaan daerah TA 2027</li> </ul>	v		- PP Nomor 12 Tahun 2019 Permendagri Nomor 77 Tahun 2020		v	BPPKAD	Oktober
17.	Perda Eksekutif	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan dan peningkatan produktifitas tenaga kerja</li> <li>- Penempatan tenaga kerja dan dan perluasan kesempatan kerja</li> <li>- Hubungan kerja</li> <li>- Perlindungan dan pengupahan</li> <li>- Jaminan sosial</li> <li>- Fasilitas kerja</li> <li>- Hubungan industrial</li> </ul>		v	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU Nomor 13 Tahun 2003</li> <li>- UU Nomor 6 Tahun 2023</li> <li>- PP Nomor 34 Tahun 2021</li> <li>- PP Nomor 35 Tahun 2021</li> </ul>		v	Dinkop UMTK	Proses fasilitasi di Provinsi
18.	Perda Eksekutif	Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Kediri	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kebijakan strategis RP3KP</li> <li>- Kelembagaan</li> <li>- Peran serta Masyarakat</li> <li>- Pembinaan dan pengawasan</li> </ul>	v		<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No 1 Tahun 2011</li> <li>- PP Nomor 14 Tahun 2016</li> <li>- Peraturan Menteri PU dan Perumahan Nomor 29/PRT/M/2018</li> <li>- PermenPU Nomor 12 Tahun 2014</li> </ul>	v		Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Proses fasilitasi di Provinsi

No. (1)	JENIS (2)	TENTANG (3)	MATERI POKOK (4)	STATUS (5)		PELAKSANAAN (6)	DISERTAI (7)		UNIT/ INSTANSI TERKAIT (8)	TARGET PENYAMPAI AN (9)
				BARU	UBAH		NA	PENJEL ASAN		
19.	Perda Inisiatif	Penyelenggaraan Kota Cerdas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perencanaan dan Tata Kelola.</li> <li>- Membangun kepercayaan masyarakatatas pelayanan publik.</li> <li>- Manajemen Inovasi.</li> <li>- Dimensi Pengelolaan Perkotaan dengan Pendekatan Kota Cerdas</li> <li>-</li> </ul>	v		<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU Nomor 25 Tahun 2009</li> <li>- PP Nomor 82 Tahun 2012</li> <li>- Perpres Nomor 95 Tahun 2018</li> <li>-</li> </ul>	v		Bapedda	Proses fasilitasi di Provinsi
20.	Perda Inisiatif	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kriteria cagar budaya</li> <li>- Registrasi cagar budaya</li> <li>- Pelestarian cagar budaya</li> <li>- Pengelolaan cagar budaya</li> <li>- Peran serta masyarakat</li> </ul>	v		<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU Nomor 11 Tahun 2010</li> <li>- PP Nomor 1 Tahun 2022</li> <li>- Permen Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.49/UM.001/MKKP/2009</li> <li>- Permen PU dan Perumahan Rakyat Nomor 19 Tahun 2021</li> </ul>	v		Disbudparpora	Proses fasilitasi di Provinsi

DEWAN PERWAKILAN RAKYAR DAERAH  
KOTA KEDIRI  
KETUA,



**Dra. F I R D A U S**